

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Separatisme memang menjadi masalah internasional yang cukup sensitif. Menurut data sejak tahun 1950-an, sekitar 70 kelompok etnis yang terkonsentrasi di dalam sebuah wilayah geografis tertentu, terlibat dalam perjuangan senjata bagi penentuan nasib sendiri atau gerakan separatisme. Angka tersebut tentu saja lebih tinggi dari perang antar-negara yang terjadi sejak akhir PD ke-2.¹

Data sampai tahun lalu memperlihatkan bahwa sejak tahun 2003 saja, telah terjadi 22 konflik separatisme yang tetap berlangsung tanpa penyelesaian. Di antaranya adalah Oromo dan Somali di Ethiopia, Chechnya di Rusia serta pemberontakan Tripura, Assam serta Muslim Kashmir di India. Sementara itu untuk periode tahun 2001-2002, terdapat tiga kasus yang merupakan konflik baru serta 22 kasus merupakan kelanjutan dari konflik yang telah berlangsung lama. Hanya 9 kasus gerakan separatisme yang bisa diselesaikan selama masa waktu tersebut.

Sejak prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) menjadi salah satu prinsip paling fundamental dalam komunitas internasional, kemunculan setiap gerakan separatisme akan selalu disikapi *maximum alert*. Artinya, separatisme yang didesain untuk memporandakan keamanan negara akan mendapat atensi prioritas pemangku kekuasaan. Tidak ada pemerintah di dunia yang sudi

¹ “Dreams of Independence” online pada <http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2000/06/0000630.html>. (diakses pada 10 Januari 2009)

membiarkan separatise menggerogoti keabsahan soliditas, baik sebagai *nation* maupun *state*.

Dalam konteks pergulatan kekuatan politik antara dua kelompok yang berseberangan, masalah penyitaan atensi dan interes publik adalah elemen krusial. Unsur pers atau media, segmen asing, penyertaan emosional (*emotional attachment*), heroisme kultural lokal, dan kehadiran simbol-simbol negara menjadi instrumen politik yang dikelola cerdas oleh para aktor, inisiator, dan provokator separatise.

Separatise mengirim sinyal serius kepada masyarakat internasional tentang adanya realitas domestik sebuah negara. Separatise mudah tersublimasi dalam *domestic constraint* yang memengaruhi opini publik dan sikap pemerintah. Relevansi diplomasi dalam penanganan isu separatise terbatas pada upaya meyakinkan publik internasional tentang tidak adanya alasan bagi mereka untuk mendelegitimasi sikap tegas pemerintah dalam menumpas gerakan separatise.

Meskipun demikian, keberhasilan diplomasi sangat bergantung pada penanganan sejak awal isu separatise secara domestik. Penanganan yang tepat dan bijak harus dilakukan. Paralel, dengan pengelolaan kebijakan luar negeri yang diarahkan pada upaya untuk membentengi kepentingan nasional dengan menjaga *geographical credential* (manusia, sumber daya alam, dan capital) dari penggerogotan internal serta disinuisasi eksternal.

Setiap gerakan separatise pasti selalu tertarik untuk menggunakan medium terbuka yang mereka harapkan dapat membawa isu mereka dalam *spot light* masyarakat internasional. Atensi masyarakat global terhadap persoalan-

persoalan domestik telah terinfiltrasi ke dalam berbagai macam bentuk *pressure* atau tekanan. Masalah separatise domestik yang tidak tertangani baik oleh aparat akan memancing keprihatinan masyarakat internasional. Internasionalisasi persoalan bisa merepotkan, karena biasanya agendanya juga akan dibuat rumit. Dengan demikian, langkah-langkah kuda kedua kelompok separatis itu tetap perlu diwaspadai secara saksama.

Dari berbagai pengalaman internasional dapat dilihat bahwa hampir semua kasus tersebut melewati beberapa tahapan-tahapan penting yang berbeda. Dalam tahap yang paling awal, biasanya separatise muncul sebagai "gerakan politik". Data internasional menunjukkan ada 48 kelompok etnik di dunia yang melakukan perlawanan politik. Tiga kasus lainnya adalah perubahan dari teknik perlawanan bersenjata menuju perlawanan politik, yaitu Serbia di Kroasia, Kurdi di Iran dan Baluchi di Pakistan. Beberapa kasus lain mungkin masuk ke dalam tahap "politik militan", yang dilakukan dalam bentuk pemogokan, boikot, protes massa besar-besaran. Biasanya sering terjadi kasus kekerasan yang kecil di sana-sini sebagai wujud simbolik dari gerakan seperti ini. Misalnya, gerakan Tibet di Cina dan Ibo di Nigeria.²

Sedangkan tahap berikutnya adalah fase konflik kekerasan atau pemberontakan bersenjata. Ini pun secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tahap permusuhan tingkat rendah, permusuhan tingkat tinggi serta campuran antara konflik dan perundingan (*talk-fight*). Kategori yang pertama ini bisa dilihat dalam kasus pemberontakan, Uighur di Cina, serta Ijaw di Nigeria.

² Lihat George Eaton Simpson and J Milton. Yinger. Racial and Cultural Minorities : an Analysis of Prejudice and Discrimination. Harper and Row, New York, 1953. Page 57 - 60

Selain itu, gerakan Basque di Spanyol sejak tahun 1999 berubah masuk di dalam kelompok ini. Sementara itu kategori kedua terjadi di Rusia, Palestina serta beberapa kasus di India dan Kashmir. Rencana pembunuhan terhadap Arafat dan beberapa pembunuhan terhadap tokoh HAMAS di Palestina telah memperkuat konflik kekerasan yang seolah tiada hentinya di kawasan tersebut. Kategori *talk-fight* bisa ditemukan dalam kasus suku Karen di Myanmar, Gerakan Moro di Filipina serta suku Kabinda di Angola. Biasanya ini merupakan tahap transisi dari konflik kekerasan menuju perundingan, baik gagal ataupun berhasil.³

Salah satu negara yang juga mengalami permasalahan tersebut adalah Turki. Negara Turki dengan suku etnis Kurdi. Masalah Turki dengan etnis Kurdi tidak bisa dianggap remeh. Konteks tradisi negara Turki mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil terhadap kurdi yang pada perkembangannya melakukan separatise terhadap negara kedaulatan.

Republik Turki, sejak berdirinya telah menetapkan perdamaian sebagai pilar utama di negaranya. Damai secara realistis dan konsisten yang dipandu oleh prinsip "*Peace at Home and Peace Abroad (damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional)*" ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator keamanan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler demokratis dan sistem politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi modernitas dengan identitas budaya. Turki ingin membantu mengamankan dan memelihara perdamaian,

³ Ibid, hal 3.

kemakmuran, stabilitas dan kerjasama lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia di dalam negeri dan dunia internasional.

Namun, cita-cita Turki tidak selamanya mulus. Pengalaman sejarah telah membuktikan peliknya permasalahan yang dihadapi oleh Turki terkait dengan perlawanan separatis yang terus belangsung merongrong stabilitas negara. Salah satu kelompok utama gerakan separatise datang dari etnis Kurdi yang sejak perang dunia I masuk kedalam wilayah Republik Turki. Kurdi tidak pernah merasa puas menjadi bagian dari Turki, sehingga hal ini menimbulkan serangkaian pemberontakan untuk melepaskan wilayah Kurdistan Turki namun akhirnya gagal.

Dewasa ini sekitar separuh dari semua populasi Kurdi keseluruhan tinggal di Turki, etnis Kurdi adalah minoritas terbesar di Timur-tengah yang tidak memiliki negara. Mereka meliputi 20% total populasi rakyat Turki dan sebagian besar tinggal di bagian tenggara negeri Turki. Dengan potensi kekuatan yang sedemikian besar itu, politik nasionalisme Kurdi di Turki semakin menguat. Ditandai dengan banyaknya bermunculan klub dan organisasi kebudayaan maupun gerakan yang memperjuangkan Kurdi di Turki. Bentuk dan ragamnya sangat bervariasi. Ada dari mereka yang mengambil gerakan kiri, gerakan tersembunyi sehingga sangat sedikit diketahui, seperti *Partiya Karkaren Kurdistan* (PKK). Ada juga yang memakai jalur legal dalam perjuangannya seperti mendirikan partai politik legal seperti *Halkin Demokrasi Partisi* (HADEP) dan yang lainnya.

Dua kelompok yang disebutkan terakhir di atas merupakan sebagian kecil saja dari kelompok-kelompok perjuangan Kurdi di Turki. Mereka telah ada sejak 1970-an. Bentuk dan perjuangan masing-masing kelompok perjuangan Kurdi tersebut sangat beragam. Tidak hanya dari cara dan juga instrumen tapi bahkan jaringan serta cita-cita ideologis mereka juga bisa sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. PKK misalkan, menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyuwjkan cita-cita perjuangannya. Berbeda dengan HADEP yang malah lebih memilih jalur perjuangan dari dalam dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ada.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui kebijakan pemerintah Turki terhadap kelompok-kelompok perjuangan Kurdi yang ada di negaranya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan perilaku negara terhadap kelompok-kelompok etnis minoritas.
2. Menambah dan meningkatkan minat penelitian skripsi bertemakan perjuangan kelompok etnis atau suku.

C. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian diatas maka perumusan permasalahan yang dapat dikemukakan disini adalah; *Bagaimana kebijakan Turki terhadap kelompok-kelompok perjuangan Kurdi yakni PKK dan HADEP?*

D. KERANGKA PEMIKIRAN (TEORI)

1. Teori Reintegrasi

Alexandra Guaqueta, dalam buku *Reintegrating Armed Groups After Conflict : Politics, Violence and Transition*, mendefinisikan reintegrasi sebagai proses yang membiarkan ketidak teraturan berkembang menjadi situasi yang berbagi peran kekuasaan melalui kompetisi elektoral atau mentransformasikan kelompok menjadi warga negara yang taat kepada hukum juga disertai dengan pengakuan sosial serta pengaruh dalam pendapat publik. Tidak hanya itu juga ikut dalam kebijakan di tingkat lokal dan internasional.

‘letting ... irregular armies share power through electoral competition or transforming them into law-abiding citizens with social recognition and influence in public opinion and policy-making at the local or national levels’ (p. 34).

Alexandra juga mencatat bahwa kelompok-kelompok harus diupayakan untuk diterima oleh masyarakat yang relevan dan memiliki kapasitas untuk melakukan interaksi sosial dan politik sebagai lawan bicara. Dia juga menyoroti pentingnya konteks internasional yang menetapkan batas-batas untuk transformasi sosial yang sah dan organisasi politik serta konteks politik domestik yang mendefinisikan kontrak sosial baru dan bentuk proses rekonstruksi.

Kurdi membentuk sekitar 18% dari populasi di Turki (sekitar 14 juta) pada tahun 2008. Kurdi membentuk kelompok minoritas terbesar di Turki, dan mereka telah mengajukan tantangan paling serius dan gigih untuk gambar resmi dari masyarakat homogen. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, pemerintah telah menyamakan statistik kehadiran Kurdi dengan menggolongkan mereka sebagai Turki pegunungan. Banyaknya kelompok organisasi Kurdi yang muncul juga merupakan masalah besar bagi kesatuan dalam satu bendera Turki. Saat ini ada

belasan organisasi dalam tubuh Kurdi di Turki diantaranya; Kurdistan Socialist Party (PSK), Kurdistan Workers Party (PKK), Islamic Party of Kurdistan (PIK), Kurdistan Liberation Party, Kurdish Socialist Party of Turkey, Kurdistan Freedom Falcons, Union of Kurd Labourers, Kurdistan Democratic Party of Turkey, Kurdish Islamic Unity Party, Communist Party of Kurdistan, Revolutionary Party of Kurdistan, People's Democracy Party (HADEP) dan yang lainnya.

Kelompok-kelompok tersebut ada yang menggunakan kekerasan dalam perjuangannya seperti halnya PKK yang sampai sekarang masih terus berurusan dengan militer pemerintahan Turki dan ada juga yang menggunakan jalur aman dengan cara ikut dalam pemilu dan bertarung menduduki jabatan-jabatan penting di parlemen seperti HADEP. Beberapa kelompok tersebut dicap sebagai kelompok teroris dan sebagian yang lainnya tidak.

2. Teori Represif

Jurgen Habermas, seorang filsuf jerman mengatakan bahwa Represif merupakan lawan dari deliberatif. Deliberatif berarti menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah. Sedangkan Represif merupakan kekuasaan yang menindas, memaksakan kehendak serta perundang-undangan kepada masyarakat.⁴ Hal tersebut bisa berupa penyiksaan atau penghambatan terhadap individu atau kelompok dengan alasan politik, terutama sekali bertujuan untuk membatasi atau mencegah kemampuan mereka untuk mengambil bagian dari kehidupan politik masyarakat.

⁴ Lihat Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris, Jakarta :kanisus, 2007. hal..112 -116

Rakyat yang konfrontatif terhadap pemerintah diawasi bahkan dimusnakan dari percaturan politik. Demikian pula mereka yang berhaluan dan bersebrangan dengan pemerintah. Kebijakan represif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lainnya adalah menggunakan materi dalam hukuman dan imbalan, berisi perintah, serta komunikasi satu arah. Tindakan represif ini bisa direpresentasikan dengan kebijakan diskriminatif, pelanggaran HAM, penyalahgunaan penyalahgunaan, kebrutalan polisi, penjara, penyelesaian spontan, melucuti hak-hak warga negara, pembersihan dan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, eksekusi, penyiksaan, penghilangan paksa dan hukuman di luar hukum dari aktivis politik, pembangkang, atau populasi umum.

Tindakan represif banyak dijumpai dalam kebijakan pemerintah Turki terhadap suku Kurdi. Selama dua dekade pertama pemerintahan republik Turki terbentuk, terjadi total 27 pemberontakan. Pemerintah Turki merespon pemberontakan dengan mengeksekusi pemimpin Kurdi, mendeportasi orang Kurdi ke wilayah Barat dan membuat kebijakan untuk mengasimilasi Kurdi. Penggunaan bahasa Kurdi dan mengenakan pakaian tradisional dilarang, budaya dan kegiatan politik Kurdi dilarang.

Demi memulihkan perdamaian publik dan mewujudkan reformasi tahun 1961 yang diinginkan oleh konstitusi. Pemerintah Turki mengambil langkah-langkah yang keras terhadap organisasi-organisasi oposan pemerintah. Sejumlah besar orang, termasuk beberapa wartawan dan akademisi terkemuka ditangkap, Partai Pekerja Turki ditutup, kebebasan dibatasi dan otonomi universitas dan serikat buruh dikurangi. Beda lagi dengan yang terjadi pada tahun 1971. Karena

kondisi negara berada dalam kesemrawutan dan anarki, bahkan tentara Turki ikut campur dalam kehidupan politik.

Aktivitas represif ini juga muncul dalam perilaku negara memperlakukan kelompok-kelompok perjuangan Kurdi. Tidak sedikit organisasi Kurdi yang ada di Turki yang secara sepihak ditutup, kemudian pemimpin mereka ditangkap dan dipenjara. Perilaku represif tidak hanya berupa kekuatan militer, tapi juga ada hal-hal yang bisa memicu penodaan terhadap negara maka akan berakhir dengan fatal. Seperti halnya bahasa Kurdi yang dilarang diperdengarkan di Turki dan sebagainya.

E. HIPOTESA

Berdasarkan kerangka dasar pemikiran di atas, dapat diambil kesimpulan sementara: *“Turki menggunakan standar ganda kebijakan terhadap kelompok-kelompok perjuangan Kurdi seperti PKK dan HADEP, tidak hanya kebijakan reintegrasi namun juga kebijakan represif.”*

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini sebagian besar didapatkan dari data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel di internet dan lain-lain.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Masalah separatis minoritas adalah masalah yang sangat menarik untuk dipaparkan dan dianalisa. Dari sekian banyak masalah separatise yang dilakukan minoritas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut masalah pergerakan minoritas Kurdi yang berada di Turki. Ternyata separatis Kurdi juga memiliki varian kelompok yang cukup banyak. Untuk mempertajam tingkat analisa,

penelitian hanya menekankan pada dua kelompok separatise Kurdi, yakni Partai Pekerja Kurdistan (*PKK/ Kurdistan Workers Party/Partiya Karkaren Kurdistan*) dan Partai Demokrasi Rakyat (*HADEP/People's Democracy Party*).

Dua kelompok ini menarik karena masing-masing punya gaya dan cara yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingannya. PKK seringkali menggunakan kekerasan sedangkan HADEP menggunakan cara-cara kooperatif. PKK masuk dalam daftar organisasi teroris sedangkan HADEP tidak. Penulis akan banyak menyoroti kedua aktor Kurdi ini antara tahun 2000 sampai tahun 2006. Kenapa tahun 2000, karena pada tahun inilah kelompok-kelompok Kurdi terutama PKK mengalami pergeseran kepemimpinan yang sangat ekstrim. Dari pendahulunya yang begitu berkharisma dan berwibawa, Ocalan ditanggap dan dihukum mati. Sejak tahun ini, penulis rasa PKK dan para kelompok Kurdi lainnya sedang mengalami masa transisi. Sehingga, tahun-tahun ini bisa dikatakan bahwa Turki mengalami proses integrasi yang cukup menonjol bersama kelompok perjuangan Kurdi. Alasan berikutnya kenapa membatasi dengan tahun 2006, karena pada tahun setelahnya yakni 2007, Turki secara nasional sedang mengalami kepemimpinan nasional dengan naiknya Abdullah Gul sebagai presiden dari Partai AKP. Ini juga mempengaruhi perbedaan apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga memfokuskan pada tahun 2000 sampai 2006 penulis akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas obyek yang diteliti. Meskipun demikian, peristiwa-peristiwa diluar batasan tersebut yang dianggap penulis mempunyai relevansi kuat juga akan tetap dipaparkan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab pertama, membahas kerangka awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengambarkan sistem politik yang berjalan di Turki, lebih memfokuskan untuk menjawab pertanyaan utama, siapa rezim yang berkuasa mengambil kebijakan terkait kelompok separatis di Turki?.

Bab ketiga Bab III ini menggambarkan tentang dinamika artikulasi politik di Kurdi pada dua kelompok; yakni *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK) dan *Halkin Demokrasi Partisi* (HADEP).

Bab keempat, menjelaskan analisis kebijakan Turki terhadap kelompok-kelompok perjuangan Kurdi. kebijakan apa saja yang Turki terapkan dalam pemerintahannya dalam mengatasi kelompok-kelompok Kurdi sesuai dengan dasar teoritik yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab kelima, adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.